



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2018

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



bpbdrescue45@gmail.com
bpbdkotamadiun.go.id

**JL.SOEKARNO HATTA 45 MADIUN
TLP. 0351 - 491991**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 merupakan bentuk evaluasi untuk menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 ke dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi Kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) masih belum maksimal. Oleh karena itu upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Madiun, Januari 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



AGUS HARIONO S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta upaya mewujudkan good governance maka perlu disusun laporan kinerja yang merupakan aktualisasi semangat reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk lebih mendayagunakan aparatur negara, yaitu tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, juga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan akuntabel melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terbentuk.

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Madiun dikandung maksud sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

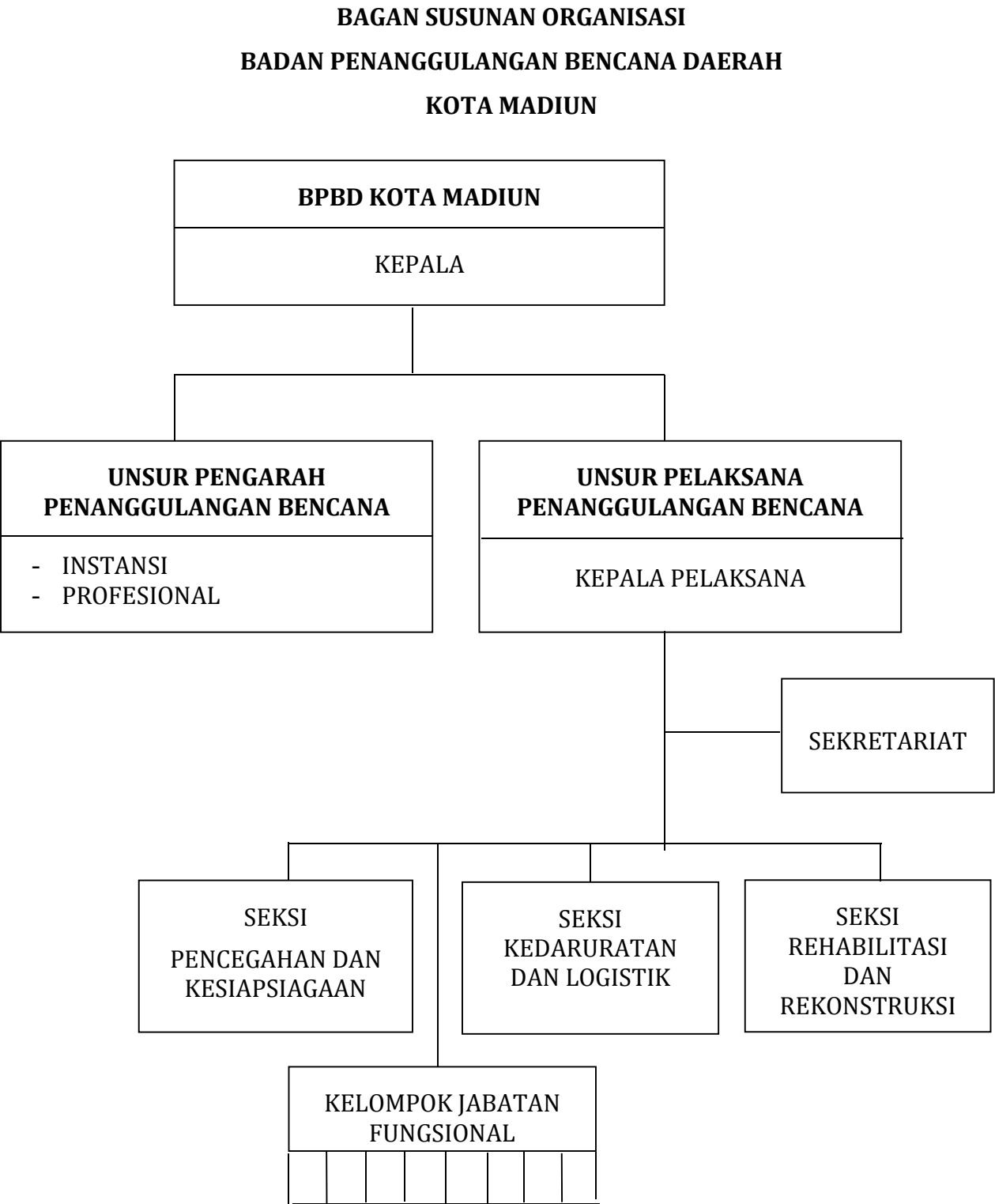
Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana saat terjadi bencana hingga tahapan pasca bencana.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

- a. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- b. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi :
 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terdapat Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sebagai berikut :



D. Isu Strategi

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Madiun, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan penanggulangan bencana.

Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Madiun pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah berkaitan dengan :

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu seperti : banjir atau genangan air, angin puting beliung dan kebakaran ;
2. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara – cara menghadapinya ;
3. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana ;
4. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana ;
5. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor ;
6. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES) ;
7. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Madiun yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana.

Meskipun urusan pemadam kebakaran sudah tidak menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tetapi secara teknis apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan adanya Piket Siaga Bencana oleh para relawan siap membantu dan berperan aktif dalam penanganan darurat kebakaran.

E. Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan di Kota Madiun sesuai landasan perencanaan 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mendasar pada aspek-aspek yang meliputi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas serta lingkup luas wilayah Kota Madiun.

Sebagai unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun melaksanakan fungsi koordinasi dengan Dinas atau Instansi vertikal dan horizontal di daerah, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat darurat atau terjadinya bencana dan pasca bencana.

Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana, juga sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

F. Sistematika

Sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran umum BPBD Kota Madiun, serta Struktur Organisasi BPBD Kota Madiun.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar penetapan kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018, meliputi Rencana Strategis Tahun 2014-2019, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Indikator Kinerja Tahunan (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 sesuai dengan sasaran strategis dalam Renstra BPBD Kota Madiun Tahun 2014–2019, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja serta realisasi keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis BPBD Kota Madiun

Perencanaan Pembangunan secara strategis mensyaratkan suatu proses penyusunan yang dilakukan secara komprehensif yaitu dengan memperhatikan aspek geografis dan demografis termasuk pergerakan perubahan atau dinamika yang terjadi di dalam masyarakatnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menyusun suatu Perencanaan Strategis untuk Tahun 2014–2019 sebagai wujud kesatuan arah dari semua unsur (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014–2019 juga sebagai acuan penyusunan program kegiatan selanjutnya.

Implikasi terbentuknya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah berupa perubahan paradigma penanggulangan terhadap bencana dari responsif menjadi penekanan pada proses mitigasi, sehingga “Mindset” para pelaksana pembangunan diharapkan membuat perencanaan yang berwawasan aman bencana.

Sebagai bagian dari kewajiban terhadap Undang – Undang tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun diberi kewenangan untuk menangani kebencanaan.

Sehubungan hal tersebut guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menyusun langkah – langkah kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi guna memberikan kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.

Adapun arah dan acuan yang digunakan dalam pencapaian tujuan serta pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan Visi, Misi Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun) yang telah ditetapkan.

Sedangkan Visi, Misi dan tujuan serta kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014–2019 dan RKPD, juga harus sejalan dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai induk organisasi penanggulangan bencana di Jawa Timur.

a. Visi

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (LAN dan BPKP) yang dimaksud dengan visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.

Rumusan Visi suatu organisasi juga harus mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tujuan terluas dan terumum, termasuk semuanya yang berarti memperjelas arah yang akan dicapai organisasi ;
- b. Gambaran aspiratif di masa depan ;
- c. Inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik ;
- d. Pencapaian hasil dan ;
- e. Komunikasi pernyataan Misi dan persuasive pimpinan.

Visi itu merupakan suatu impian, untuk mewujudkannya harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan antara lain :

- a. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi (Imaginable) ;
- b. Memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi (Disinable) ;
- c. Memungkinkan untuk dicapai ;
- d. Terfokus pada permasalahan utama Instansi agar dapat beroperasi secara ekonomis, efektif dan efisien ;
- e. Berwawasan jangka panjang, tidak mangabaikan perubahan dan perkembangan.

Atas dasar beberapa kriteria atau persyaratan tersebut serta memperhatikan, mempertimbangkan Visi Pemerintah Kota Madiun maupun Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merumuskan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MADIUN YANG SIAP SIAGA, TANGGAP DAN TANGGUH MENGHADAPI BENCANA”.

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita – cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal bagi masyarakat Kota Madiun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya untuk mewujudkan dan melaksanakan kebijakan maupun kegiatan yang diarahkan pada program kegiatan penanggulangan bencana sebagai hasil perumusan dan implementasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Siap siaga menghadapi bencana adalah bahwa pada saat ini konsep penanggulangan bencana telah mengalami perubahan yang mendasar.

Pemaknaan terhadap bencana yang secara konvensional dianggap sebagai sebuah kejadian yang tidak dapat dicegah, kemudian mengalami pergeseran makna bahwa bencana dapat diduga sebelumnya sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko.

Tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana adalah **“tanggap”** berarti peka atau paling tidak mengenali gejala – gejala atau potensi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. **“Tangguh”** berarti memiliki ketahanan (resilience) dalam menghadapi resiko bencana yaitu dengan melakukan antisipasi dan persiapan seoptimal mungkin ketika bencana terjadi.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Oleh sebab itu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan Instansi yang diwujudkan dalam produk dan jasa pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani serta nilai – nilai yang dapat diperoleh.

Terkait hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merumuskan Misi dengan memperhatikan relevansi Misi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, sedangkan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai induk organisasi dengan tugas dan fungsi yang sama perlu pula diaktualisasikan dalam Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Adapun rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN SECARA TERENCANA, TERPADU, TERKOORDINIR DAN MENYELURUH “.

Penjelasannya :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kota Madiun ;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana ;
3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Sedangkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah :

“ Meningkatkan penanganan bencana yang responsif “

d. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Ada 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien.

e. Indikator Kinerja

Ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para pakar tentang indikator antara lain :

- Indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi (Wilson dan Sapanudnart, 1993) ;
- Indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992) ;
- Indikator adalah variabel yang membantu kita untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981).

Indikator kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian kinerja, berupa masukan, proses, keluaran hasil dan atau manfaat pelaksanaan program kegiatan.

Dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas maka ditentukan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Sasaran : Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien
- Indikator :
 - Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana ;
 - Persentase peralatan tanggap darurat yang siap digunakan ;
 - Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Adapun untuk mengetahui lebih jelas tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bisa di lihat dalam tabel di bawah ini.

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang siap siaga, tanggap dan tangguh menghadapi bencana
- Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat Kota Madiun secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.
- Tujuan : Meningkatkan penanganan bencana yang responsif.

No	Indikator	Rumus	Kondisi awal 2014	Kondisi akhir 2019
1	2	3	4	5
1.	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	100 %	100 %

Tabel Indikator Sasaran

Sasaran								
Uraian	Indikator Sasaran	Rumus	Kondisi Awal 2014	Target Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien	Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	Jumlah korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100%	100 %	100%	100%	100%	-
		$\frac{\text{Jumlah korban bencana saat darurat bencana}}{\text{Jumlah korban bencana saat darurat bencana}} \times 100\%$						
	Persentase peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	Jumlah peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	100%	100 %	100%	100%	100%	-
		$\frac{\text{Jumlah peralatan tanggap darurat yang digunakan}}{\text{Jumlah peralatan tanggap darurat yang dimiliki}} \times 100\%$						
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	100%	100 %	100%	100%	100%	15 menit
		$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$						

Berkaitan dengan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, terdiri dari 1 (satu) Indikator Tujuan, 1 (satu) Sasaran yang mengakomodir 3 (tiga) Indikator yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur ;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi ;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang telah disusun oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja BPBD	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	B
2.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien	1. Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100%
		2. Persentase peralatan tanggap darurat bencana yang siap digunakan	100%
		3. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **1.758.070.899,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan good governance juga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Selaku pengemban amanah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berkewajiban menyusun atau membuat Laporan Kinerja yang merupakan aktualisasi dari semangat reformasi menyeluruh untuk mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 disusun dalam bentuk laporan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat dilakukan melalui pengukuran berdasarkan tingkat capaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tahun 2018) sebagai berikut :

No	Sasaran				Capaian Kinerja
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien	1. Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana ;	100%	100%	100%
		2. Persentase peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	100%	100%	100%

		3. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------

Dari tabel diatas bisa dijelaskan bahwa :

- a. Indikator Kinerja dari sasaran “Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien“ di dukung oleh 1 (satu) program, dengan 4 (empat) kegiatan.
 - Indikator Kinerja “Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana“ pada tahun 2018 nilai capaiannya 100% karena dari beberapa kejadian bencana yang ditangani semua sudah selesai tertangani.

Adapun jenis bencana yang tertangani sebagai berikut :

No.	Nama Bencana	Jumlah kejadian	Jumlah yang tertangani	Ket.
1.	Banjir/Genangan Air	4 kali	4 kali	
2.	Puting Beliung/Pohon Tumbang	15 kali	15 kali	
3.	Tenggelam	4 orang	4 orang	
4.	Kebakaran	52 kali	52 kali	
5.	Rumah Roboh	6 kali	6 kali	
6.	Sosial	6 kali	6 kali	

Foto Kejadian Bencana :

- 1. Banjir



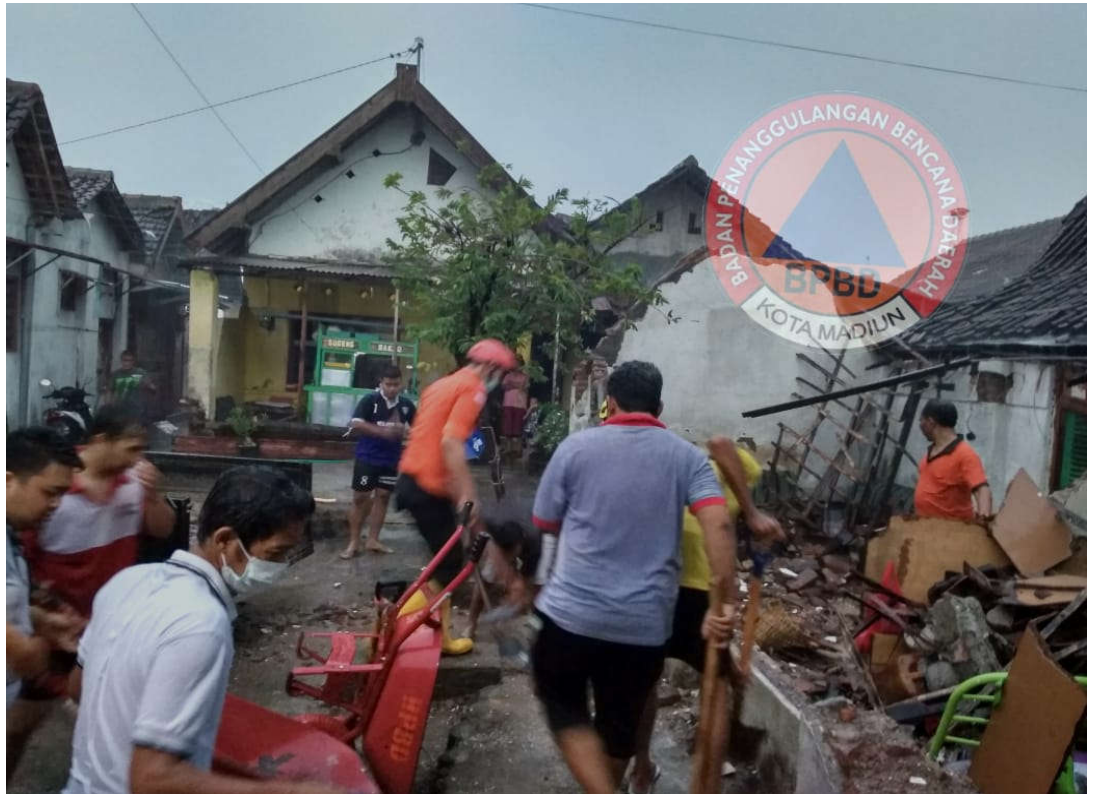
2. Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang



3. Pencarian Orang Tenggelam



4. Rumah Roboh



5. Sosial

- a. Pengiriman Personil Ke BPBD Provinsi Jawa Timur guna membantu penerimaan Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah



b. Penangkapan Ular liar yang masuk ke rumah warga



c. Evakuasi Sarang Tawon di rumah warga



6. Kebakaran



Untuk bencana kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bersifat membantu secara teknis Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) dilapangan dengan melibatkan para Relawan Piket Siaga Bencana guna lebih memaksimalkan peran Relawan ini dalam membantu penanganan kebencanaan. Karena pemadam kebakaran sudah menjadi urusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun.

- Indikator Kinerja “Persentase peralatan tanggap darurat yang siap digunakan” adalah nilai capaiannya 100%, karena peralatan penanggulangan bencana yang siap pakai dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bisa dipergunakan sesuai peruntukkannya pada saat tanggap darurat bencana.

Data peralatan tanggap darurat bencana yang siap pakai dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Ranger	1 unit	
2.	Mobil Resque	1 unit	
3.	Mobil Pick Up	1 unit	
4.	Mobil Tangki	1 unit	
5.	Perahu Karet	3 unit	

6.	Sepeda Motor Trail	2 unit	
7.	Mesin Penyedot Air	7 buah	
8.	Mesin Potong Rumput	2 buah	
9.	Mesin Potong Kayu	3 buah	
10.	Mesin Potong Beton	1 buah	

- Indikator kinerja “Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)” antara target dan realisasi 100%, demikian pula nilai capaian kinerjanya, hal tersebut karena pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk pengurangan resiko bencana yang dimulai saat menerima informasi dari warga atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian bencana yang langsung melakukan penanganan bencananya.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tahun 2014 – 2018)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Nilai Kinerja Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien	Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	100%

Melihat tabel diatas terlihat bahwa nilai capaian Indikator Kinerja Sasaran dari tahun ke tahun sesuai target, hal tersebut menunjukkan bahwa program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik di dukung pula oleh kegiatan pelayanan kebencanaan secara rutin apabila sewaktu waktu terjadi bencana.

No.	Tahun	Jenis Bencana					Ket.
		Banjir/Genangan Air	Angin Puting Beliung/Pohon Tumbang	Pencarian Orang Tenggelam	Kebakaran	Lain - Lain	
1.	2014	2	-	-	26	1	Erupsi Gunung Kelud
2.	2015	3	5	3	28	1	Percobaan bunuh diri
3.	2016	9	15	2	12	1	Percobaan bunuh diri
4.	2017	3	7	1	28	2	Perbantuan (Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Ponorogo Dan Pacitan)
5.	2018	4	15	4	52	6	Animal Resque, Orang bunuh diri, Korban Laka

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra Tahun 2019	Nilai Capaian Kinerja s/d Tahun 2018
1 .	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien	1. Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100%	100%
		2. Persentase peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	100%	100%
		3. Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	100%	100%

Melihat tabel diatas bisa dijelaskan bahwa Sasaran “Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien” dengan nilai capaian kinerja untuk Tahun 2018 semuanya mencapai 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Mencermati hasil beberapa perbandingan capaian kinerja yang tersajikan dalam tabel diatas menunjukkan adanya keberhasilan bahkan nihil kegagalan, hal tersebut ditunjang beberapa faktor antara lain :

- a. Kondisi wilayah Kota Madiun dimana luas wilayah Kota Madiun hanya 33,23 Km² terbagi dalam 3 (tiga) Kecamatan sehingga memudahkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebencanaan ;
- b. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana seperti Mobil Ranger, Mobil Rescue, Mobil Tangki Air, Perahu Karet, Sepeda Motor Trail dan peralatan penunjang lainnya ;
- c. Sumber Daya Manusia (Pegawai serta Relawan Piket Siaga Bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun) ;
- d. Dukungan Dana dari APBD Kota Madiun ;
- e. Adanya koordinasi dengan Instansi terkait, Lembaga/organisasi kebencanaan serta partisipasi masyarakat ;
- f. Adanya dukungan 30 (tiga puluh) orang Relawan Piket Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala. Kendala yang ada saat ini adalah belum maksimalnya pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun karena pegawai yang sangat terbatas.

5. Analisis Program atau Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Program Kegiatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Program Kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran :
“Meningkatnya Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah”, yang terdiri dari :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- b. Program kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran :
- “Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien“ terdiri dari :
- Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan perjanjian kinerja bisa dilihat dalam pengelolaan keuangan Tahun 2018 melalui tabel realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	5	6	7
1.	Meningkatnya Kinerja BPBD (Program Pendukung)	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	466.000.331	424.768.700	91.15
		2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	191.051.000	172.059.417	90.06
		3. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	113.667.000	111.589.200	98.17
		4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	24.016.000	18.247.664	75.98

2.	Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana Secara Efektif Dan Efisien	1. Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	963.336.568	875.617.756	90.89
----	--	---	-------------	-------------	-------

Analisis Efisiensi anggaran atas penggunaan sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Rata - rata capaian kinerja	% Serapan Anggaran	Efisiensi Anggaran
1.	Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana Secara Efektif Dan Efisien	100	90,89	9,11

Dengan melihat tabel diatas dapat dijelaskan rata – rata capaian kinerja dari sasaran “Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana Secara Efektif Dan Efisien” lebih besar nilainya daripada persentase serapan anggaran maka bisa disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Efisiensi Anggaran telah terpenuhi. Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui besarnya Efisiensi Anggaran, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rata - rata capaian kinerja} - \text{Serapan anggaran} \\
 &= 100 - 90,89 \\
 &= 9,11
 \end{aligned}$$

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 disusun sebagai gambaran dan bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan kegagalan penyelenggaraan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran, tujuan dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun serta dalam mewujudkan good governance.

Penyelenggaraan pemerintahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi seluruh komponen, baik dari masyarakat, pemangku kepentingan (Stakeholder) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maupun para Relawan, diharapkan terus dipertahankan serta ditingkatkan sehingga target akhir sasaran, tujuan, misi serta visi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 dapat terwujud.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2018 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas bagi berbagai pihak yang membutuhkan serta sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program kegiatan pada masa yang akan datang.

Madiun, Pebruari 2019

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA MADIUN



AGUS HARIONO S.Sos.M.Si
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

Lampiran - Lampiran

Lampiran - Lampiran

- a. Matriks Renstra
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- c. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Formula (Penjelasan Perhitungan)		Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	Huruf	-		B	BB	BB	Baik
2.	Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	Persen	Jumlah korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	X 100%	100%	100%	100%	Baik
			Jumlah korban bencana saat darurat bencana					
3.	Persentase peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	Persen	Jumlah peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	X 100%	100%	100%	100%	Baik
			Jumlah peralatan tanggap darurat yang dimiliki					
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Persen	Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	X 100%	100%	100%	100%	Baik
			Jumlah kejadian bencana					

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS HARIONO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003



WALIKOTA MADUREA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS HARONO, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madurea

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUJENING RUSMIYANTO, SH, M.Hum
Jabatan : Walikota Madurea

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madurea, Januari 2019

Pihak Kedua,

H. SUJENING RUSMIYANTO, SH, M.Hum

Pihak Pertama,

AGUS HARONO, S.Sos, M.Si
Kepala Pelaksana
NP. 19650607 196506 1 003

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien	1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	15 Menit

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	534.000.000,00	
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	223.800.000,00	
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	66.000.000,00	
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000,00	
5. Program Pencegahan Diri Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	936.028.000,00	
Jumlah	1.783.828.000,00	

Madiun, Januari 2019


WALI KOTA MADIUN
H. M. MUHAMMAD NUR MUHAMMAD, S.K.M., M.Hum

KERUA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS NARDONO S. Soe, S.E.
 Jombone Tingkat I
 NIP. 19630607 196009 1 003

PANGKURAN KINERJA
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA MADIUN**

Indikator Kinerja	Satuan	Formula (Penjelasan Perhitungan)	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1. Akuntabilitas Kinerja BPBD	Huruf	-	B	BB	BB	Baik
2. Efektifitas korban bencana yang tangani saat darurat bencana	Persen	Jumlah korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100%	100%	100%	Baik
		Jumlah korban bencana saat darurat bencana	x 100%			
3. Efektifitas peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	Persen	Jumlah peralatan tanggap darurat yang siap digunakan	100%	100%	100%	Baik
		Jumlah peralatan tanggap darurat yang dimiliki	x 100%			
4. Ketepatan Waktu Tanggap (Response Rate)	Persen	Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	100%	100%	100%	Baik
		Jumlah kejadian bencana	x 100%			

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA MADIUN



